

ABSTRAK

Nama: Junanda, NIM 121300273 judul skripsi: ***Peran Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.***

Suatu upaya untuk mengetahui permasalahannya yang dialami oleh lembaga yang menjalankan undang-undang keterbukaan informasi dalam mewujudkan pemerintahan banten yang baik (transparan) karena diketahui Pemerintah Provinsi Banten secara keseluruhan belum membuka informasinya kepada publik padahal Undang-undang NO 14 Tahun 2008 sudah ditetapkan.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten 2). Apakah Kendala Komisi informasi publik Provinsi Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1). Untuk mengetahui Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten. 2). Untuk mengetahui Kendala Komisi Informasi publik Provinsi Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mengetahui pemerintahan Provinsi Banten dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik (transparan) adapun teknik samplingnya adalah *non random* sampling yaitu hanya unsur-unsur yang dapat dijumpai saja yang diteliti dan diselidiki reputasinya relatif dalam ciri, sifat, karakter Pemerintahan Banten. Sedangkan pengolahan data digunakan analisis data (*content analysis*) dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data dari maksud dan tujuan terkandung dalam data-data hasil penelitian lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Provinsi Banten masih jauh dari kata pemerintahan yang baik dikarenakan pemerintahan yang cenderung menutup informasinya KIP Provinsi Banten merupakan lembaga yang menjalankan undang-undang keterbukaan informasi dan hak atas informasi merupakan HAM yang melekat di setiap individu secara alamiah serta informasi merupakan ciri dari Negara yang menganut sistem demokrasi, Seharusnya dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pemerintah membuka selebar-lebarnya informasi kepada seluruh masyarakat.